

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional yang menjadi interaksi antara dua atau lebih aktor yang tindakannya memiliki konsekuensi penting terhadap faktor lain dari luar yurisdiksi efektif tiap unit politiknya (Siegfried Schieder, 2014). Meskipun pada hakikatnya hubungan internasional juga sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari oleh pakar sejarah internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, filsafat dan pakar ekonomi internasional. Lantaran hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia yang di dalamnya berisikan interaksi negara-negara sosial yang bertanggung jawab dan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara ketertiban internasional dan memajukan keadilan internasional.

Maka dari itu negara-negara yang merdeka satu sama lain saling berdekatan dan saling memengaruhi, oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk negara-negara dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain (Darwin, 2007).

Darwin mencoba untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah negara seharusnya hidup berdampingan karena tidak ada jalan lain selain untuk saling memengaruhi satu sama lain dalam dunia internasional. Secara historis, dalam hubungan internasional, barat memegang posisi kekuasaan dunia. Secara tradisional, teori hubungan internasional mengambil sistem modern Eropa-Wstphalia sebagai awal dari hubungan internasional, dan pada akhirnya menciptakan hegemoni barat dan diskursus. Negara-negara Timur tidak pernah

dikembangkan dengan satu pun dari gagasan seperti konsep negara-bangsa dan kedaulatan yang semuanya merupakan gagasan barat yang kemudian dikembangkan dari hasil pergulatan historis barat. Seperti contoh seorang sarjana Amerika Serikat Richard C. Longworth yang menyatakan bahwa globalisasi berarti kemenangan ekonomi pasar Anglo-Saxon (identitas kelompok kebudayaan Inggris). Seperti apa yang dikemukakan oleh Asrudin dalam bukunya yang berjudul *Refleksi Teori Hubungan Internasional* bahwa,

Teori hubungan internasional tidak bisa dipisahkan dari hegemoni Amerika, dan tidak mengejutkan jika Tiongkok yang merupakan negara major power menginginkan banyak sarjana-sarjana Tiongkok untuk membangun teori hubungan internasional dengan karakteristik Tiongkok itu sendiri. Upaya keras para sarjana-sarjana Tiongkok tentu telah melalui jalan panjang dan berliku dalam mencapai status internasional (termasuk Bahasa Tiongkok), dan masuknya Tiongkok ke dalam WTO (World Trade Organization), untuk mampu berintegrasi ke dalam komunitas internasional dan muncul dalam sistem internasional yang didominasi oleh Barat, Tiongkok telah menapaki jalan yang panjang hingga saat ini (Asrudin, 2009).

Salah satu cabang ilmu atau bidang studi yang dipelajari oleh penstudi hubungan internasional adalah persoalan kebijakan luar negeri suatu negara yang dapat menjadi citra atau strategi negara dalam bertindak di kancah dunia. Studi kebijakan luar negeri atau juga sering disebut *Foreign Policy Study*. KJ Holsti menjelaskan bahwa ketika sebuah negara berinteraksi maka disebutnya sebagai politik internasional. Seperti Tiongkok yang memberikan kebijakan luar negerinya dalam dinamika konflik Laut China Selatan yang di dalamnya juga melibatkan banyak aktor negara baik *claimens state and non claimens state* seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan bahkan Amerika Serikat serta Indoneisa.

Tiongkok merupakan salah satu pihak yang memiliki klaim langsung atas wilayah di kawasan Laut China Selatan melalui *Nine Dash Line* (Sembilan Garis

Putus-putus), atas klaim Tiongkok tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan klaim pihak lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Brunei. Tiongkok terus melakukan usaha dominasi, baik di wilayah sengketa maupun dalam perundingan multilateral dalam mempertahankan klaimnya. Menurut historis klaim kedaulatan wilayah Tiongkok atas Laut China Selatan seluas 1,7 juta kilometer persegi yang berbentuk huruf U sudah sejak lama Tiongkok menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau di Laut China Selatan. Secara letak geografisnya Laut China Selatan memperlihatkan adanya tumpang tindih perbatasan, karena adanya perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki suatu negara dan bertindih dengan wilayah lainnya. Hadirnya masalah tumpang tindih perbatasan teritorial kedaulatan serta klaim bukan hanya satu-satunya sumber konflik, melainkan masalah hak berdaulat atas adanya Landas Kontinen dan ZEE (*Zone Economic Exclusive*). Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei mengklaim batasan wilayah mereka di Laut China Selatan berdasarkan *Exclusive Economic Zone (EEZ)* yang sudah ditentukan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut pada 10 Desember 1982.

Adapun bentuk pengklaiman yang dilakukan oleh negara-negara pantai seperti Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, mengajukan klaim di Laut China Selatan umumnya didasari oleh penemuan (*discovery*), pendudukan (*occupation*), yurisdiksi administratif (*administrative jurisdiction*), pencantuman secara resmi ke dalam wilayah (*official incorporation into the territory*), konfirmasi dari perjanjian internasional (*confirmation of title by international agreement*), pengakuan internasional (*foreign recognition*),

pelaksanaan wewenang secara damai dan kesinambungan (*peaceful and continuous display of authority*), perkembangan sejarah (*historical development*), penyerahan hak dari negara lain (*succession right from foreign government*), hak kedaulatan atas landas kontinen (*sovereign rights over continental shelf*), dan yang terakhir ialah hak berdaulat atas ZEE.

Hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN sangat berbeda-beda dan juga mengalami perubahan. Contohnya seperti hubungan Tiongkok dengan Indonesia yang awalnya memiliki hubungan yang cukup hangat pada era kepemimpinan Presiden Soekarno namun berhenti pada era kepemimpinan Soeharto yang sangat anti dengan komunisme. Adapun sikap Vietnam terhadap Tiongkok yang dipengaruhi oleh sejarah konflik kedua negara tersebut di masa lalu menjadi tantangan dalam konflik Laut China Selatan ini.

Tiongkok juga menjadi negara yang telah menguasai suatu daerah (mengokupasi) Vietnam selama ratusan tahun dan konflik-konflik sengketa yang terjadi antara kedua negara tersebut yang akhirnya membuat ketidakharmonisan hubungan kedua negara (Prayudi, 2015).

Dalam pertemuan Menteri luar negeri Tiongkok Qin Gang bersama menteri luar negeri Indonesia Retno Mursadi di Jakarta pada 22 Februari 2023, keduanya membicarakan jika Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara akan mengintensifkan negosiasi *Code of Conduct* (COC) untuk Laut China Selatan di tahun 2023 di tengah berlanjutnya friksi di perairan yang penting secara ekonomi tersebut. Negosiasi antara ASEAN dan Tiongkok mengenai COC dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei/Juni dimana Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini dan akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya. COC dimaksudkan untuk

mengurangi resiko konflik di Laut China Selatan di jalur air yang disengketakan di mana klaim maritime “Sembilan garis putus-putus” Tiongkok yang luas berbenturan dengan klaim empat negara ASEN; Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Indonesia sendiri secara resmi menganggap dirinya asebagai pihak yang bersengketa, tetapi “Sembilan garis putus-putus” tumpang tindih dengan sebagaian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (<https://thediplomat.com/2023/02/china-asean-to-accelerate-consultations-on-south-china-sea-code/>, Diakses pada 20.28, 11 April 2023).

Meskipun Tiongkok telah berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan, namun kenyataannya tujuan Tiongkok tidak sesuai dengan tindakannya di dalam Laut China Selatan yang justru lebih menunjukkan kecenderungan yang semakin agresif sejak tahun 2011. Tindakan yang dilakukan Tiongkok meningkat seiring dengan peningkatan nasionalisme Tiongkok, peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dan sikap asertif Tiongkok di Laut China Selatan. Adapun kebijakan yang menunjukkan taktik agresif Tiongkok di LCS adalah:

1. Adanya insiden pengusiran kapal perusahaan energi yang melakukan eksplorasi di kawasan ZEE dan kapal Filipina Veritas di dekat Reed Bank oleh kapal Tiongkok serta pemotongan kabel peralatan seismic kapal Petro Vietnam dan kapal Viking 2 di kawasan ZEE Vietnam oleh kapal Tiongkok.
2. Tiongkok melakukan pengetatan implementasi pelarangan menangkap ikan tahunan (unilateral annual fishing ban) di kawasan utara LCS dan telah

menangkap lebih dari selusin kapal nelayan Vietnam serta memberikan tembakan peringatan pada kapal nelayan Filipina.

3. Kapal-kapal Tiongkok menurunkan material konstruksi di Amy Douglas Reef yang merupakan kawasan ZEE Filipina dan menempatkan penanda di Reed Bank dan Boxall Reef. Insiden ini menyalahi perjanjian DoC yang melarang pihak-pihak untuk menempati fitur geografis yang belum dihuni pihak manapun.

Tiongkok dalam upayanya untuk mempertahankan klaim kepemilikan Laut China Selatan mengeluarkan berbagai kebijakan atau cara seperti melakukan kerja sama eksplorasi minyak dengan Amerika Serikat, membuat peta klaim pada tahun 1947, melakukan reklamasi serta membangun infrastruktur di Laut China Selatan. Mendasari kepentingan utama kebebasan navigasi, Amerika Serikat semakin terlibat dalam inisiatif keamanan dan militer dengan masing-masing negara dan juga mendukung posisi ASEAN. Meskipun beberapa analisis mengamati bahwa kebijakan Amerika Serikat baru saja menjadi “tantangan simbolis” terhadap batasan yang ditarikk Tiongkok di wilayah yang diperebutkan. Namun Rubiolo M.F. memberikan pandangan lain terhadap hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di mana,

Sebagian besar pandangan menyoroti pemulihan hubungan Amerika Serikat dengan kawasan tersebut sebagai strategi untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara Asia Tenggara (Rubiolo M. F., 2020).



Gambar 1.1

Peta Wilayah Laut China Selatan

Sumber: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>

Pada dasarnya *Nine Dash Line* merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok. *Nine Dash Line* menjadi wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometre persegi yang 90 persen darinya diklaim oleh Tiongkok sebagai hak maritim historisnya. Jalur *Nine Dash Line* ini membentang sejauh 2.000 km dari daratan Tiongkok hingga beberapa ratus km dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Sampai pada hari ini *Nine Dash Line* sampai sekarang masih digunakan Tiongkok sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluar 2 juta km persegi. Klaim *Nine Dash Line* ini akhirnya berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 km persegi atau sekitar 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya negara Indonesia, negara-negara

lain, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga terkena imbas dari klaim *Nine Dash Line* yang dibuat sepihak oleh Tiongkok ini. Wilayah yang masuk dalam *Nine Dash Line*, seperti Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Sedangkan untuk laut di Kepulauan Sparty, Tiongkok bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. (<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna-?page=all#>, Diakses pada, 13.57 WIB, Minggu, 12 April 2023).

Dalam beberapa hal yang mendasar, kehidupan dunia hubungan internasional juga salah satunya adalah tentang ekonomi-politik internasional. Jika ekonomi adalah tentang pencapaian kekayaan, dan politik adalah tentang pencapaian kekuatan, keduanya berinteraksi dengan cara yang rumit dan juga memusingkan (Gilpin, 2001). Isu Laut China Selatan saat ini menjadi salah satu aspek yang paling nyata dari meningkatnya suatu popularitas antara dua ekonomi besar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat. Laut China Selatan menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, dan dengan demikian menghubungkan jalur produsen minyak di Timur Tengah dan Afrika dengan ekonomi industri di Asia Timur Laut. Ini juga menyediakan jalur utama perdagangan barang perantara di Asia Timur. Jalur laut ini juga digunakan oleh Tiongkok sebagai salah satu proyeksi kekuatan Angkatan lautnya. Perkiraan pada tahun 2017 menempatkan total 40% perdagangan internasional Tiongkok melewati wilayah tersebut, dan 22% dari total perdagangan Asia Timur. Adapun Selat Malaka yang merupakan *Chokepoint* yang paling terkenal, di mana menjadi jalur 80% minyak yang diimpor oleh Tiongkok.

Berakhirnya masa kepemimpinan Jiang Zemin yang kemudian dilanjutkan oleh era kepemimpinan Hu Jintao pada tahun 2003, di mana pada era tersebut Tiongkok sudah menjadi *major power*, terutama dalam bidang perekonomian, arah politik luar negeri Tiongkok pun semakin jelas jika Tiongkok ingin menciptakan situasi internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonominya dengan cara menghindari konfrontasi yang ada. Pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat. Tiongkok semakin aktif dalam mempromosikan globalisasi ekonomi dan multipolarisme. Tiongkok yang telah mengklaim sebagian besar Laut China Selatan yang kaya energi, yang dilalui kapal perdagangan bernilai lebih dari US\$3 triliun setiap tahunnya, di bawah kepemimpinan Xi, Tiongkok telah mengambil sikap yang semakin tegas di Laut China Selatan. Selama dekade terakhir, telah memulai proyek reklamasi besar-besaran dan menolak tekanan diplomatik setelah pengadilan Arbitrase Laut China Selatan di Den Haag tahun 2016 menolak klaim teritorialnya. (https://www-channelnewsasia-com.translate.goog/asia/china-xi-jinping-south-china-sea-reclamation-third-term-2994081?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, Diakses, 15.25 WIB, 19 Juni 2023).

Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konflik Laut China Selatan baru-baru ini telah menunjukkan keinginannya yang tidak tergoyahkan untuk memperluas supremasinya di wilayah tersebut, tidak hanya dalam istilah diskursif tetapi melalui serangkaian kebijakan dan tindakan nyata yang lebih tegas. Sejak Tiongkok naik ke tampuk kekuasaan, Xi Jinping telah menerapkan kebijakan internasional yang lebih percaya diri, terlihat, dan proaktif, menunjukkan keinginan

Tiongkok untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan kekuatannya yang tumbuh (Zhang, 2015). Pada tanggal 21 Maret 2018 pemerintah Tiongkok menerbitkan dokumen lanjutan yang mengumumkan bahwa Polisi Bersenjata Rakyat akan mengambil kendali penuh atas Penjaga Pantai Tiongkok (*Coast Guard*) dan melepaskan sebagian besar fungsi non-militer, seperti pertambangan, kehutanan, dan perlindungan. Kebijakan perubahan tersebut sama dengan Penjaga Pantai Tiongkok atau *China Coast Guard* yang ditempatkan di bawah inkarnasi Polisi Bersenjata Rakyat yang baru direformasi dan lebih “dimiliterisasi”, yang dikendalikan oleh Komisi Militer Pusat. (<https://warontherocks.com/2018/04/china-welcomes-its-newest-armed-force-the-coast-guard/>. Diakses pada 17.53, 20 April 2023)

Kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan di Laut China Selatan sangatlah potensial terutama hidrokarbon-minyak, dan gas alam serta sumber daya perikanan yang melimpah. Selain itu Laut China Selatan juga merupakan laut internasional yang letaknya strategis. Pada 13 Februari 2023 Tiongkok memberikan tanggapannya kepada Filipina yang tidak menerima jika penjaga pantai Laut China Selatan telah berusaha memblokir salah satu kapal milik Filipina yang mendukung misi pasokan pasukan yang ditempatkan di LCS. Hal tersebut dibantah oleh Tiongkok karena menurutnya penjaga pantai di LCS melakukan tindakan sesuai hukum. (<https://www.zawya.com/en/world/china-and-asia-pacific/china-says-coast-guards-actions-were-lawful-in-south-china-sea-row-tfccq73k?amp=1> Diakses pada 13.38, 12 April 2023)

Meskipun Laut China Selatan merupakan laut semi tertutup yang mengelilingi sepuluh negara pantai dan enam di antaranya termasuk negara yang mengklaim dan ikut terlibat dalam perselisihan territorial yang tumpang tindih antara Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Taiwan yang di mana negara-negara tersebut telah menyatakan klaim kedaulatan territorial atas berbagai hak di perairan tersebut. Pentingnya Laut China Selatan bagi Tiongkok adalah tidak hanya karena lokasinya yang strategis tetapi juga karena sumber daya alamnya. Bagi Tiongkok, klaim atas Laut China Selatan juga untuk melindungi kepentingan utamanya pada sarana militer karena diyakini sebagai Laut China Selatan. Dari segi ekonomi, kepentingan nasional Tiongkok bahwa Laut China Selatan digunakan untuk meningkatkan reformasi ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi negaranya.

Keberhasilan Tiongkok atas klaimnya di Laut China Selatan lantas menunjukkan kekuatan besar untuk negara lain, tentunya tidak hanya di Asia Tenggara atau kawasan Asia Timur, tetapi juga di ranah internasional (Harini, Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan., 2011).

Dalam kebijakan luar negerinya Tiongkok memiliki karakteristik politik luar negeri yang sangat dinamis. Sebagai salah satu negara terbesar yang sedang berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional terutama di Kawasan Asia-Pasifik, politik luar negeri Tiongkok dinilai sangat mempengaruhi kemakmuran dan kondisi domestik negaranya. Tentunya akan sangat penting bagi Tiongkok bagi kemajuan negara Tiongkok itu sendiri dalam memformulasikan kepada negara lain atau dunia internasional atas sebuah kebijakan luar negerinya.

Seperti pada 1 April 2020 kapal penjaga Laut China Selatan dan kapal penangkap ikan Vietnam bertabrakan di dekat Pulau Woody di Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok yang mengklaim pulau ini sebagai wilayah berdaulat, pada saat itu Tiongkok mengklaim kapal penangkapan ikan Vietnam masuk kawasan tersebut secara illegal dan menolak untuk pergi setelah diperintahkan untuk pergi oleh personel penjaga Laut China Selatan, yang kemudian bertabrakan dengan kapal Tiongkok setelah melakukan manuver berbahaya. Namun Vietnam berpendapat jika kapal penangkap ikan Vietnam sengaja ditabrak oleh penjaga Laut China Selatan. Delapan awak kapal yang tenggelam itu dijemput oleh pelaut penjaga Laut China Selatan bersama dengan dua kapal Vietnam, yang ditarik kembali ke pelabuhan. Pada bulan Februari 2023 Tiongkok telah memperluas penggunaan pasukan angkatan laut konvensionalnya, termasuk Angkatan laut dan milisi maritimnya. Tiongkok menggunakan kekuatan ini pada bulan Februari ketika sebuah kapal penjaga LCS menyerang kapal patrol Filipina dengan laser tingkat tinggi saat kapal itu berusaha mendekati *Second Thomas Shoal* dalam misi memasok pasukan di LCS. (<https://warontherocks.com/2023/03/using-1202-authorities-to-counter-chinas-maritime-militia/> Diakses pada 13.53, 12 April 2023)

Taktik asimetris angkatan laut Tiongkok menyediakan alat yang digunakan Tiongkok untuk menjalankan strateginya, yang pada akhirnya memberikan rasa control efektif yang lebih besar atas wilayah tersebut bagi para pemimpin politik. Laut China Selatan berlaku signifikansi khusus untuk Partai Komunis Tiongkok, pemerintah Tiongkok ingin mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Selain itu Laut China Selatan juga berfungsi sebagai jalur laut strategis yang dilalui

sekitar 39 persen perdagangan Tiongkok. Dalam upaya mempertahankan klaimnya, Tiongkok juga telah menugaskan angkatan militernya untuk memberlakukan kebijakan “pertahanan maju”, yang memperluas jangkauan militer di luar perbatasan Tiongkok untuk memperluas kedalaman strategisnya. Seperti kebijakan Tiongkok pada April 2020, di mana Tiongkok mendirikan dua distrik administratif tingkat Kabupaten atau distrik Xisha dan Nansha untuk menjalankan Pulau Parcels, Spratlys, dan Macclesfield Bank yang disengketakan. Sementara itu, Kementerian Urusan Sipil dan Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok memberikan “*Standar Name*” untuk fitur-fitur di Laut China Selatan, termasuk 25 beting dan karang serta 55 gunung dan punggung samudera bawah laut. Hal ini jelas merupakan upaya untuk mengkonsolidasikan otoritas dari dua distrik administrative dengan menyempurnakan yurisdiksi spesifik Tiongkok. (https://www-thinkchina-sg.translate.google.com/what-has-changed-chinas-south-china-sea-policy-under-xi-jinping?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc, Diakses pada 16.46 WIB, 8 April 2023).

Seperti pada tanggal 21 Maret 2018, kebijakan pemerintah Tiongkok menerbitkan dokumen lanjutan yang mengumumkan bahwa Polisi Bersenjata Rakyat akan mengambil kendali penuh atas Penjaga Pantai China (*Coast Guard*) dan melepaskan sebagian besar fungsi non-militer, seperti pertambangan, kehutanan, tenaga air, pemadam kebakaran, serta keamanan dan perlindungan. Perubahan tersebut sama dengan Penjaga Pantai China yang ditempatkan di bawah inkarnasi Polisi Bersenjata Rakyat yang baru direformasi dan lebih "dimiliterisasi", yang dikendalikan oleh Komisi Militer Pusat untuk terjun menjaga kedaulatan

Tiongkok di Laut China Selatan. (<https://warontherocks.com/2018/04/china-welcomes-its-newest-armed-force-the-coast-guard/> Diakses pada, 15.53 WIB, 8 April 2023).

Kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok memperlihatkan bagaimana kekuatannya dalam mempertahankan klaimnya serta dominasinya di wilayah Laut China Selatan. Tindakan yang dilakukan Tiongkok pada tahun 2019, yaitu dua kali dalam enam minggu terakhir sejak Mei, Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk mencegah operasi minyak dan gas oleh Vietnam dengan mengirimkan kapal *China Coast Guard* (CCG) dengan nomor 5303 di perairan yang diperebutkan di seberang Laut China Selatan. Sebuah kapal milik negara China, sementara itu, telah melakukan survei seismik blok minyak dan gas di lepas pantai Vietnam. Ini berisiko konfrontasi antara kontingen CCG dan kapal milisi yang mengawal kapal survei dan sekelompok kapal Vietnam yang dikirim ke daerah tersebut. Situasi ini juga mengungkapkan standar ganda: Beijing tampaknya berkomitmen untuk mencegah kegiatan minyak dan gas sepihak baru oleh tetangganya di manapun di “garis sembilan putus-putus”, yang membatasi klaimnya di Laut Cina Selatan, bahkan saat ia mengeksplorasi dan mengeksploitasi hidrokarbon di perairan yang diperebutkan. (https://amti-csis-org.translate.goog/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, Diakses pada 16.35 WIB, 8 April 2023).

Sejak awal Maret 2021, sebanyak 220 kapal dari milisi maritim Tiongkok telah ditempatkan di dekat *Whitsun Reef* di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina telah meminta pemerintah Tiongkok untuk mengarahkan kapal-kapal itu

untuk meninggalkan zona ekonomi eksklusifnya, tetapi Tiongkok membantah bahwa kapal-kapal itu bagian dari milisi, dengan mengatakan jika mereka hanyalah “perahu nelayan” yang berlindung dari kondisi laut. Tindakan ini sesuai dengan pola di mana pemimpin Tiongkok beralih ke perang tidak teratur untuk mencapai tujuan strategis di Laut China Selatan. Tentunya strategi kebijakan Tiongkok dalam mengirim milisi maritimnya ke suatu lokasi di Laut China Selatan untuk memperkuat klaim kedaulatan Tiongkok dan kemudian meningkatkan kembali dengan sedikit keterlibatan oleh kekuatan konvensional. Tindakan milisi tersebutlah yang menjadi bagian dari bukti bahwa Tiongkok telah melakukan perang tidak teratur sebagai pusat strategi kebijakan militernya. (https://mwi-usma-edu.translate.google.com/chinas-irregular-approach-to-war-the-myth-of-a-purely-conventional-future-fight/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc Diakses pada 14.27, 12 April 2023).

Adanya kepentingan strategis Laut China Selatan bagi Tiongkok, negara-negara terlibat yang juga memberikan klaimnya, dan negara-negara lain di dunia. Kawasan Laut China Selatan ini telah muncul sebagai titik nyala militer yang berbahaya karena perilaku agresif Tiongkok yang memberikan respon bagi negara terlibat untuk mempertahankan kedaulatannya. Karena beberapa kegiatan ilegal dan tidak menghormati hukum internasional, ada kebutuhan untuk mempertahankan kebebasan navigasi demi kelancaran perdagangan maritim. Banyaknya negara yang memiliki klaim tumpang tindih atas ZEE dan landas kontinen negara lain seperti Malaysia, Vietnam memiliki sengketa Teluk Tokin dengan Tiongkok. Kepulauan Paracel diklaim oleh Vietnam, Tiongkok, dan

Taiwan, sedangkan kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam, China, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang dimana induk dari semua perselisihan di Laut China Selatan adalah *Nine Dash Line* (Sembilan garis putus). Dalam konflik Natuna, Tiongkok seringkali menggunakan *Nine Dash Line* sebagai dasar klaim kepemilikan Perairan Natuna. Di sisi lain pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan pernah mengakui *Nine Dash Line*. *Nine Dash Line* pada dasarnya garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok dan menjadi wilayah historis Laut China Selatan seluas dua juta kilometer persegi yang 90 persen darinya diklaim Tiongkok sebagai hak maritim historisnya. Klaim *Nine Dash Line* berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 km persegi atau sekitar 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga terkena imbas dari klaim *Nine Dash Line* oleh Tiongkok ini. (<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna> Diakses pada 14.37, 12 April 2023).

Hadirnya kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikeluarkan dalam dinamika konflik Laut China Selatan sejak 2018-2022 pada akhirnya akan berujung menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan hingga sampai pada hari ini. Sehingga melahirkan respon-respon oleh negara-negara yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan seperti, Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apakah respon negara-negara terhadap kebijakan luar negeri

Tiongkok mengancam kepentingan nasional Tiongkok dalam konflik Laut China Selatan.

Maka dari itu, berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti faktor pendorong pembuat kebijakan luar negeri Tiongkok dalam dinamika konflik Laut China Selatan dan bagaimana respon yang diberikan oleh negara-negara yang juga memiliki klaim. Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak lepas dari penelitian/karya tulis ilmiah terdahulu yang juga membahas hal serupa. Penelitian-penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan dan membuat penelitian ini. Dimana penelitian-penelitian terdahulu menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta mengetahui dan membandingkan metode-metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu.

Dari penulisan yang dibuat oleh Arief Bakhtiar Darmawan tahun 2018 dari Universitas Jendral Soedirman tentang "*Dinamika Isu Laut China Selatan: Analisis Sumber-sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa*", kelebihan dalam karya tulis ilmiah ini adalah peneliti yaitu Arif Bakhtiar memiliki opini pribadi yang mengatakan jika adanya faktor ego (internal) Tiongkok yang berupa kapabilitas militer, kebutuhan ekonomi, dan nilai nasionalisme, memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konflik LCS. Selain itu saudara Arief juga memberikan table grafik perbandingan anggaran militer Tiongkok, Filipinaa, Vietnam sejak tahun 2004-2014, serta membuat kerangka sumber-sumber kebijakan luar negeri Tiongkok yang mudah untuk dimengerti oleh penulis. Hanya saja hal yang menjadi kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini tidak terlalu memperlihatkan bagaimana

dinamika konflik di Laut China Selatan yang menjadi fokus utama sebelum penjelasan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok.

Dari penulisan yang dibuat oleh Setyasih Harini pada tahun 2011 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta tentang “*Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan*”, kelebihan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan landasan teori yang berisikan tentang teori kepentingan nasional Tiongkok dalam konflik Laut China Selatan, dimana fokus penelitian ini lebih ke dalam kepentingan nasional Tiongkok dalam dinamika konflik LCS. Di sisi lain yang menjadi kekurangan dalam tulisan saudari Setyasih Harini adalah tidak ada metode penelitian yang dijelaskan, dan karya tulis lebih merujuk kepada kepentingan nasional Tiongkok, maka akan sulit menemukan bagaimana respon-respon negara terlibat dalam tindakan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konflik LCS.

Dari penulisan atau karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Ade Priangani dan Jeremy Aldi Rezki Hattu pada tahun 2020 dari Universitas Pasundan tentang “*Strategi RRC dalam Dinamika Konflik Laut China Selatan*”, kelebihan dalam karya tulis ilmiah milik saudara Ade dan Jeremy terletak pada pembahasannya yang lebih merujuk pada bagaimana tindakan ASEAN dan juga fokus penelitian terhadap rencana serta tindakan liberalisasi ekonomi-politik Tiongkok, hal tersebut dapat membantu penulis untuk bisa melengkapi penelitian ini dalam segi ekonomi-politik. Sedangkan hal yang menjadi kekurangannya adalah kurangnya topik pembahasan mengenai bagaimana respon negara terlibat dari strategi yang dibuat oleh Tiongkok dalam dinamika konflik LCS.

Dari penulisan artikel atau karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Muhar Junef pada tahun 2016 dari Jurnal Penelitian Hukum tentang “*Sengketa Wilayah Maritim di Laut China Selatan*”, yang menjadi kelebihan dalam tulisan tersebut adanya pembahasan mengenai dasar hukum berdasarkan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 serta saudara Muhar memberikan poin analisis kasus yang mampu menambah bahan wawasan penulis dalam membuat penelitian ini. Selain itu pembahasan karya tulis ilmiah tersebut memiliki fokus permasalahan untuk menyelesaikan sengketa LCS. Sedangkan kekurangan yang ada pada karya tulis ilmiah saudara Muhar Junef tidak adanya penjelasan mengenai sudut pandang atau respon negara-negara terlibat dinamika konflik LCS.

Dari karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris pada tahun 2017 dari Universitas Padjadjaran tentang “*Implikasi Hukum atas Putusan Permanent Court of Arbitration terkait Sengketa Laut China Selatan terhadap Negara di Sekitar Kawasan*”, yang menjadi kelebihan dalam karya tulis ini yaitu pada penelitiannya yang merujuk pada pembahasan bagaimana dampak hukum *arbitration* terhadap negara-negara di kawasan dimana klaim wilayah di kawasan LCS hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam UNCLOS 1982. Selain itu yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini hanya karena pembahasannya yang terfokus pada penyelesaian sengketa melalui hukum arbitrase, kurangnya pembahasan yang menjadi fokus penulis dalam kebijakan luar negeri Tiongkok dan respon negara terlibat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul:

“Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Dinamika Konflik Laut China Selatan (2018-2022)”

Penulisan ini didukung oleh beberapa mata kuliah Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Analisis Politik Internasional. Mata kuliah yang menganalisis politik internasional dan juga kebijakan luar negeri yang mendukung politik sebuah negara seperti negara besar Tiongkok dalam dalam tatanan dunia. Menganalisa bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok yang notabeneanya merupakan negara *major power*.
2. Dinamika Politik Internasional. Menganalisis bagaimana suatu fenomena internasional melalui kebijakan politik luar negeri. Menganalisa beberapa kebijakan politik luar negeri Tiongkok dalam dinamika konflik Laut China Selatan. Di mana dinamika yang ada pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana respon negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan Brunei yang juga terlibat dalam konflik LCS.
3. Studi Keamanan Internasional. Dalam mata kuliah ini membantu menjelaskan bagaimana tindakan suatu negara ketika berinteraksi dengan negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara yang dikeluarkan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di luar wilayahnya demi mempertahankan keamanan nasionalnya. Seperti dalam konflik LCS, melalui mata kuliah ini dapat membantu penulis untuk melihat bagaimana

tindakan aktor-aktor negara yang terlibat dalam dinamika konflik Laut China Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Dari latar belakang, identifikasi masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Dinamika Konflik Laut China Selatan (2018-2022)”**.

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Dalam penulisan ini masalah yang dibahas tentu akan berkembang dengan seiring waktu, variabel antara variabel akan berhubungan dan berkembang menjadi masalah yang diteliti. Dengan itu berikut beberapa identifikasi masalah pada penulisan ini.

1. Apa saja kebijakan luar negeri Tiongkok dalam dinamika konflik Laut China Selatan 2018-2022?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap konflik Laut China Selatan 2018-2022?
3. Bagaimana respon negara-negara yang juga memiliki klaim dalam konflik Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini dengan pemaparan latar belakang masalah, pembatasan masalah hanya sampai pada tindakan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam dinamika konflik Laut China Selatan pada kurun waktu 2018-2022. Adapun yang menjadi pembatasan masalah di dalam penelitian ini juga pada respon negara-negara yang juga memiliki klaim di dalam konflik Laut China Selatan.

Selain itu, pembatasan waktu pada penelitian ini yaitu, sejak tahun 2018 di mana tanggal 21 Maret, pemerintah Tiongkok menerbitkan dokumen lanjutan yang mengumumkan bahwa Polisi Bersenjata Rakyat akan mengambil kendali penuh atas Penjaga Pantai China (*Coast Guard*). Perubahan tersebut sama dengan Penjaga Pantai China yang ditempatkan di bawah inkarnasi Polisi Bersenjata Rakyat yang baru direformasi dan lebih "dimiliterisasi", yang dikendalikan oleh Komisi Militer Pusat. Sedangkan di tahun 2019 Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk mencegah operasi minyak dan gas oleh Vietnam dengan mengirimkan kapal *China Coast Guard* (CCG) di perairan yang diperebutkan di seberang Laut China Selatan.

Pada tahun 2020 Tiongkok semakin agresif menegaskan klaimnya di LCS saat negara-negara di kawasan itu sedang memerangi pandemi virus corona. Tahun 2020 ini Tiongkok mengeluarkan kebijakan mendirikan dua distrik administratif tingkat kabupaten atau distrik Xisha dan Nansha pada April 2020, untuk menjalankan Paracels, Spratlys, dan Macclesfield Bank yang disengketakan. Bulan berikutnya, Tiongkok membuka pelabuhan yang mencakup silo pertahanan dan landasan pacu kelas militer, di *Fiery Cross* dan *Subi Reefs*.

Di tahun 2021 sebanyak 220 kapal dari milisi maritim Tiongkok telah ditempatkan di dekat *Whitsun Reef* di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina telah meminta pemerintah Tiongkok untuk mengarahkan kapal-kapal itu untuk meninggalkan zona ekonomi eksklusifnya, tetapi Tiongkok membantah bahwa kapal-kapal itu bagian dari milisi, dengan mengatakan jika mereka hanyalah “perahu nelayan” yang berlindung dari kondisi laut, dan pada tahun 2022 Tiongkok berkomitmen untuk perdamaian di Laut China Selatan meskipun ada provokasi dari AS. Tiongkok dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial dan kepentingan maritimnya di Laut China Selatan. yang masih menjadi perkembangan dan masa berlangsungnya konflik. Pada pembatasan masalah penulis juga membatasi pada respon dari negara-negara yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan atas kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok dari 2018-2022.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana upaya setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Tiongkok terhadap dinamika konflik Laut China Selatan yang akhirnya melahirkan respon dan tindakan yang diberikan oleh negara-negara terlibat tahun 2018-2022.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam menangani konflik Laut China Selatan 2018-2022.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap dinamika konflik Laut China Selatan.
3. Untuk menganalisis respon yang diberikan oleh setiap negara yang terlibat di dalam dinamika konflik Laut China Selatan.

1.5 Kegunaan Penulisan

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita tentang bagaimana suatu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok yang dapat menjadi faktor pendorong bagi kekuatan politik luar negerinya dalam bertindak di sebuah konflik yang melibatkan banyak negara di Laut China Selatan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Tulisan ini dibuat untuk dapat membantu para sarjan di bidang hubungan internasional untuk mendapatkan perspektif, pengetahuan, terutama dalam bagaimana pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konflik dinamika Laut China Selatan dan respon negara-negara terlibat terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok pada konflik LCS. Dan diharapkan jika tulisan ini dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penulisan berikutnya pada bidang yang sama di masa mendatang.